



RENCANA KINERJA TAHUN 2018



PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS I B

Jalan Raya Kaliori Nomor 58 Telp. (0281) 796019 Fax. 0281 796255

Website : www.pa-banyumas.go.id Email : office@pa-banyumas.go.id

BANYUMAS - 53191

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hukum dan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks dan didukung keterbukaan komunikasi dan informasi, tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B adalah untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Banyumas dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi dirinya pada sektor yang sangat berkait erat dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dan juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media perencanaan yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja Tahunan mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan juga untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Strategi 2015 - 2019 Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B sebagai Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut, Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2018 sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan.

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; Penyusunan Rencana Kinerja (RKT) 2018 telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Kelas I B jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya (*blue print*).

Rencana Kinerja Tahun 2018 ini sebagai tonggak awal Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B dalam menancapkan pondasi - pondasinya dalam membangun sebuah sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan penerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018 PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indicator Kegiatan	Target	Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang harus diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase Perkarayang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK e. Index responden pencari keadilan	100 % 100 % 100 % 98 % 98 %	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan percepatan penyelesaian perkara Meningkatkan percepatan penyelesaian perkara Meningkatkan percepatan penyelesaian perkara Meningkatkan kualitas putusan Pengadilan Agama Meningkatkan kepercayaan	Memeriksa mengadili dan memutus perkara secara responsive, progresif dan tidak terpaku pada sikap positivism	100 % 100 % 100 % 98 % 98 %	

		yang puas terhadap layanan peradilan			masyarakat terhadap layanan peradilan			
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</p>	<p>95 %</p> <p>90 %</p> <p>100 %</p> <p>90 %</p>	<p>Program peningkatan manajemen Peradilan Agama</p> <p>Program peningkatan manajemen Peradilan Agama</p> <p>Program peningkatan manajemen Peradilan Agama</p> <p>Program peningkatan manajemen Peradilan Agama</p>	<p>Meningkatkan percepatan penyelesaian perkara</p> <p>Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi</p> <p>Meningkatkan penyelesaian perkara melalui Banding, Kasasi dan PK</p> <p>Meningkatkan transparansi Putusan Pengadilan Agama</p>	<p>Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tepat waktu kepada para pihak</p> <p>Melaksanakan mediasi</p> <p>Mengirim permohonan berkas perkara Banding, Kasasi dan PK tepat waktu</p> <p>Mengupload putusan melalui direktori putusan Kepaniteraan MA</p>	<p>98 %</p> <p>90 %</p> <p>100 %</p> <p>90 %</p>	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>a. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p>b. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum</p> <p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</p> <p>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</p> <p>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</p> <p>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</p>	<p>Meningkatkan Pelayanan Justice For All</p> <p>Meningkatkan Pelayanan Justice For All</p> <p>Meningkatkan Pelayanan Justice For All</p> <p>Meningkatkan Pelayanan Justice For All</p>	<p>Melaksanakan penanganan perkara prodeo</p> <p>Melaksanakan sidang keliling</p> <p>Melaksanakan penanganan perkara Permohonan (Voluntair)</p> <p>Mengadakan pelayanan pos bantuan hukum</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	98 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan Pelayanan Justice For All	Melaksanakan eksekusi	98 %	
5.	Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan	<p>Prosentase permintaan informasi tercatat pada buku register</p> <p>Prosentase menurunnya tingkat pengaduan masyarakat</p>	<p>100 %</p> <p>0 %</p>	<p>Program Peningkatan Manajemen Peradilan</p> <p>Program Peningkatan Manajemen Peradilan</p>	<p>Meningkatkan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi publik</p> <p>Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan</p>	<p>Mengadministrasikan permintaan data informasi pada buku register informasi</p> <p>Melayani pengaduan dari masyarakat melalui meja informasi / pengaduan</p>	<p>100 %</p> <p>0 %</p>	
6.	Terwujudnya kinerja aparatur peradilan yang professional dan	Prosentase penyelenggaraan rapat kerja per triwulan	100 %	Program dukungan manajemen pelaksanaan	Meningkatkan manajemen SDM yang terencana dan	Menyelenggarakan rapat baik secara rutin dan insidental	100 %	

	proposional	Prosentase temuan yang ditindak lanjuti	100 %	tugas teknis lainnya Mahkamah Agung Program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	terlaksana dengan baik Meningkatkan manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik	Menidaklanjuti temuan temuan untuk perbaikan kinerja	100 %	
		Prosentase penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan	100 %	Program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Meningkatkan manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan secara periodik	100 %	
7.	Terwujudnya lembaga peradilan yang dapat mewujudkan organisasi berbasis kinerja	Prosentase tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis bdalam pelaksanaan tugas teknis peradilan Prosentase tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan	100 % 98 %	Program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Menikatkan manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik Meningkatnya performace Pengadilan Agama	Melaksanakan tugas manajemen dan administrasi bidang kesekretariatan guna mendukung pelaksanaan tugas bidang teknis Pengadilan Agama 1.Remencanakan anggaran keuangan DIPA sesuai kebutuhan 2. Melaksanakan pertanggungjawa ban keuangan dengan baik.	100 % 98 %	

Banyumas, 2 Januari 2018

Ketua



Drs. ACHMAD HARUN SHOFA, SH.
NIP. 19570720 199103 1 001

BAB III

P E N U T U P

Belum optimalnya beberapa Standar Kinerja pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas pada bidang keahlian tertentu, seperti keahlian pada bidang analisa dan evaluasi kegiatan, menjadi pemicu Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B dalam menyusun Rencana Kinerja dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat para pencari keadilan maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan lembaga peradilan.

Diharapkan Rencana Kinerja Tahun 2018 ini dapat menjadi bahan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018, yang nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.